

IMPLIKASI HUKUM PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM TRANSAKSI EFEK SAHAM MELALUI SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (*SCRIPTLESS TRADING*)

Mirsa Ridawarista

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: mirsaridawarista@gmail.com

Abstraksi:

Perubahan sistem perdagangan saham menjadi tanpa warkat (*scripless trading*), menjadikan bentuk kepemilikan saham yang dahulu berbentuk lembaran fisik sertifikat saham berubah menjadi data elektronik berupa catatan rekening efek. Disisi lain, pembuktian kepemilikan dalam hal terjadi sengketa di pengadilan secara Hukum Acara Perdata telah menentukan bentuk alat bukti yang dapat diajukan dalam sengketa keperdataan, salah satunya yakni alat bukti surat sesuai dengan bentuk kepemilikan saham dahulu. Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang memungkinkan untuk menjadikan informasi dan transaksi secara elektronik dapat mengikat secara hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam hal ini merupakan *Lex Specialis* derogate *Lex Generali* dari KUHD, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait ketentuan yang mengatur mengenai saham yang diperdagangkan dalam pasar modal, serta data elektronik beserta hasil cetaknya yang dihasilkan dari transaksi perdagangan saham tanpa warkat melalui sistem elektronik jaringan perdagangan yang tersedia diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan diakui sebagai alat bukti dalam persidangan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Pembuktian, Kepemilikan, Saham, Perdagangan Saham Tanpa Warkat.

Abstraction

The changing of stock trading system that becomes scripless trading, it made the physical paper certificate as past form of ownership stock changes into electronic data in form of data bill effect. In other side, the ownership verification of lawsuit at court in Procedure of Civil Law manner has decided the form of evidence that can be submitted in the civil lawsuit, one of them is the evidence that appropriate with the early form of stock ownership. After the announce of Regulation number 11 year 2008 about Information and Electronic Transaction (ITE Regulation) indeed enable to make information and electronic transaction could bind over in law manner. This paper uses juridical-normative method. This research's result conclude that the Regulation number 8 year 1995 about Capital Market in this case is *Lex Specialis* derogate *Lex Generali* from KUHD, KUH Perdata,

Regulation number 40 year 2007 about Limited Company, in relation with the clause that arrange about stock which is being traded in capital market, and the electronic data and its prints that being obtained from scripless trading transaction through the existing trading network electronic system is recognized as the legal evidence also admitted as the evidence in the court.

Key terms: Law Implication, Verification, Stock Ownership, Scripless Trading.

PENDAHULUAN

Upaya memperbaiki sistem perdagangan pasar modal dilakukan seiring dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu perubahan sistem perdagangan pasar modal yang sangat signifikan adalah terkait sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) yang merupakan sistem perdagangan efek tanpa sertifikat fisik, melainkan melalui penyelesaian transaksi dengan cara pemindahbukuan (*book entry settlement*). Dengan sistem ini, kepemilikan atas suatu saham tidak lagi berwujud lembaran sertifikat saham, melainkan hanya berupa catatan rekening, sehingga dalam proses transaksi tidak diperlukan lagi membawa sertifikat saham, dan dalam penyelesaian transaksi tidak lagi diperlukan pergerakan saham secara fisik, tetapi cukup melalui pemindahbukuan.¹

Pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) memang dinyatakan bahwa “Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) tersebut yang mendasari bahwa perdagangan saham dapat dilakukan secara elektronik tanpa warkat saham. Hal yang menjadi masalah krusial kemudian terkait perdagangan saham tanpa warkat adalah berkaitan dengan pembuktian kepemilikan di pengadilan bagi pemegang saham tanpa warkat. Sebab nantinya masalah pembuktian ini akan berpengaruh kepada hakim terkait gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat ini yang juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbuatan hukum, khususnya di bidang perdata, seperti misalnya pada perdagangan efek tanpa warkat. Dalam transaksi yang

¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, **Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 107

mempergunakan teknologi informasi ini, para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini perdagangan efek tidak akan memegang alat bukti secara nyata, seperti layaknya suatu akta, yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak ataupun bukti fisik surat saham.²

Alat bukti pada proses perdagangan dengan ini hanyalah berupa hasil dari proses *book-entry settlement*, di antara para pihak. Oleh karena itulah kenyataannya transaksi perdagangan saham dengan mempergunakan sistem perdagangan secara *scripless trading* ini akan memicu terjadinya kendala dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan transaksi. Hal ini disebabkan peraturan hukum tentang perdagangan tanpa warkat atau tidak diatur secara khusus, sehingga dengan sistem hukum Eropa Continental, yang selalu mendasarkan suatu putusan dari adanya aturan di undang-undang secara jelas menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi.³ Tentunya hal ini akan menjadi permasalahan bila terjadi suatu persengketaan dalam mempermasalahkan keabsahan dari data elektronik sebagai alat bukti terjadinya perbuatan hukum dalam perdagangan efek tanpa warkat.

Kemudian adalah apakah bukti kepemilikan yang dapat ditunjukkan oleh pemegang saham bahwa dirinya memiliki sejumlah saham tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku menganut prinsip pembuktian yang eksklusif, artinya, selain dari alat bukti yang sudah ditentukan, alat bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴ Pasal 164 HIR (*Herziene Indische Reglement*) menentukan bahwa macam-macam alat bukti adalah:

- a. bukti tertulis
- b. bukti saksi
- c. persangkaan
- d. pengakuan, dan

² Sotan Budhi Saria Sjamsoeddin, **Abstrak Tesis: Analisis Kekuatan Pembuktian Kepemilikan Efek Pada Transaksi Perdagangan Efek Tanpa Warkat (online)**, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2007, Administrator, Universitas Pancasila Program Magister Ilmu Hukum (*online*) <http://s2.hukum.univpancasila.ac.id>, (06 Oktober 2013)

³ Ibid

⁴ Munir Fuady, **Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Cetakan Kedua**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 31-32

e. sumpah

Alat bukti tersebut di atas lah yang mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan hukum acara perdata dengan memperhatikan hierarkinya. Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang memungkinkan untuk menjadikan informasi dan transaksi secara elektronik dapat mengikat secara hukum. Namun kemudian bagaimana ketentuan tersebut menyesuaikan dengan hukum acara perdata terkait pembuktian kepemilikan saham yang sebelumnya memiliki bentuk fisik. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian kepemilikan saham melalui transaksi efek tanpa warkat (*scripless trading*) beserta perubahan bentuk kepemilikan saham bagi investor ini menarik untuk dibahas. Sebab hal tersebut terkait perlindungan bagi investor terhadap posisi kepemilikan sahamnya sehingga terhindar dari ulah pihak-pihak yang merugikan transaksi yang dilakukan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah pengaturan pembuktian kepemilikan saham dalam mekanisme perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) sebagai pembuktian kepemilikan hak secara hukum serta implikasi hukum kepemilikan saham menjadi tanpa warkat dalam hukum pembuktian secara perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian Kepemilikan Saham Dalam Mekanisme Perdagangan Saham Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) Sebagai Pembuktian Kepemilikan Hak Secara Hukum

1. Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 42 KUHD menentukan bahwa Anggaran Dasar suatu perseroan harus menentukan cara penyerahan saham atas nama dalam hal ini KUHD menyebutnya sebagai sero atau andil atas nama. Cara yang dimaksud adalah dengan pernyataan persero yang bersangkutan dan pihak yang akan menerima penyerahan itu, dengan disertai pemberitahuan pernyataan tersebut kepada pengurus, atau dengan

pernyataan yang sama yang kemudian dibukukan dalam buku perseroan dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak. Ketentuan Pasal 42 KUHD ini hanya berlaku bagi saham perseroan yang berada di dalam perseroan, artinya bukan merupakan saham yang *go public* yang diperdagangkan di bursa. Terkait saham dalam perseroan dalam hal ini PT erat kaitannya dengan Anggaran Dasar perseroan sebab baik pengurangan maupun penambahan modal harus melalui perubahan Anggaran Dasar.

Dalam KUHD sendiri dahulu telah mengenal apa yang dinamakan Bursa Dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 61. Definisi Bursa Dagang sendiri dalam KUHD mirip dengan apa yang sekarang disebut Bursa Efek, akan tetapi dalam KUHD Bursa Dagang lebih diartikan secara sederhana sebagai tempat bertemunya pedagang, juragan perahu, makelar, kasir perdagangan untuk melakukan permusyawaratan dan pemufakatan atas kurs dari surat-surat berharga. Mengenai peralihan dan bentuk kepemilikan hak atas sahamnya sendiri tidak ditentukan lain.

2. Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Saham yang dalam KUH Perdata disebut juga sebagai sero atau andil dalam Pasal 511 angka 4 Buku Kedua tentang Kebendaan dikategorikan sebagai benda bergerak. Saham yang dimaksud dalam Pasal 511 angka 4 KUH Perdata merupakan saham yang termasuk benda bergerak tidak berwujud maka peralihannya yang menimbulkan bentuk kepemilikan tunduk pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata bahwa penyerahan saham atas nama yang harus dibuat secara akta otentik atau di bawah tangan menimbulkan implikasi hukum bahwa kepemilikan harus didasarkan atas bukti fisik surat yang menyatakan kepemilikan seseorang atas saham dengan cara penerbitan surat efek. Nama pemilik, saham, penyertaan, atau pemegang piutang dari perikatan, kewajiban atau obligasi tersebut selanjutnya dicantumkan dalam surat efek atau warkat tersebut. Sebagai pemilik efek yang namanya tercantum dalam surat efek atau warkat, berhak untuk melakukan tindakan pemilikan, penguasaan, dan tindakan-tindakan kebendaan yang terkait dengan efek tersebut. Serta untuk penyerahan efek, sebagai piutang,

memerlukan penyerahan fisik dari warkat agar hak milik efek tersebut dapat beralih kepemilikannya.⁵

3. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham merupakan bukti pemilikan atas suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan modal yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Setiap unit usaha berbentuk PT wajib membagi modalnya atas saham. Modal ini terbagi dalam tiga tingkat, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Saham dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar, atau peningkatan modal dasar.⁶

Berdasarkan Pasal 48 UUPT ayat 1 menyatakan bahwa “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”. Mengenai bentuk bukti kepemilikan saham tidak dijelaskan secara rinci hanya pada Pasal 51 menyatakan bahwa “pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Sejalan dengan KUH Perdata, UUPT dalam Pasal 60 ayat 1 juga menyatakan bahwa “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”. Kemudian terkait pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, hal ini tercantum pada ketentuan Pasal 56 UUPT.

Hak kebendaan yang melekat pada saham sebagaimana apa yang dinyatakan dalam ketentuan di atas merupakan hak kebendaan atas saham yang berupa kepemilikan terdaftar dalam buku daftar pemegang saham dalam perseroan. Sedangkan untuk saham perusahaan *go public* berlaku ketentuan Pasal 154 ayat 1 UUPT yakni “bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”. Artinya apabila ketentuan di bidang pasar modal menentukan lain bagi perseroan terbuka maka ketentuan pasar modal lah yang berlaku. Dalam hal

⁵ Gunawan Widjaja, **Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif**, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.167-169

⁶ Adrian Sutedi, **Segi-Segi Hukum Pasar Modal**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm

ini berlaku Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

4. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Kepemilikan efek yang diperdagangkan di bursa oleh perusahaan perantara pedagang efek dalam mewakili setiap nasabah atau investor harus tercermin pada sub rekening efek nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sub rekening efek ini akan membuktikan apakah efek yang ditransaksikan secara tanpa warkat oleh perantara pedagang efek adalah milik dari nasabahnya atau milik dari perantara pedagang efek.⁷ Perdagangan saham tanpa warkat dengan jalan pemindahbukuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dimungkinkan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat 1 bahwa “penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Sebagaimana penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan, maka setelah T+3, pada masing-masing rekening efek dari investor jual maupun investor beli akan mengalami perubahan.

Untuk investor memastikan bahwa antara jumlah dana yang bertambah atau berkurang dan efek yang bertambah atau berkurang di dalam rekening efek sesuai dengan transaksi yang dilakukan, perusahaan efek setiap periode tertentu akan menginformasikan atau mengirimkan *account statement* (seperti rekening koran) atas posisi saldo yang ada dalam rekening efek investor.⁸ Hak lain yang dimiliki investor dalam penitipan kolektif atas rekening efek investor yakni menerima konfirmasi tertulis yang diberikan oleh kustodian. LPP, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian selaku kustodian wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.⁹ Pemberian konfirmasi tertulis bagi investor ini merupakan kewajiban yang diatur

⁷ Gunawan Widjaja, op.cit., hlm 178

⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, op.cit, hlm 108

⁹ Ibid, hlm 107

dalam Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 Tentang Transaksi Efek angka 3 huruf p. Konfirmasi tertulis inilah yang merupakan bukti kepemilikan saham dalam mekanisme perdagangan saham tanpa warkat, baik berupa konfirmasi yang dikirim langsung maupun hasil *print out* konfirmasi melalui komputer pemegang rekening KSEI.

Dalam praktek KSEI mengirim laporan atau konfirmasi melalui sistem jaringannya yang dinamakan C-BEST yang terhubung dengan terminal komputer milik pemegang rekening efek, konfirmasi yang dikirim berkaitan dengan rekening efek, yang meliputi antara lain: pencatatan efek dan/atau dana, mutasi efek dan/atau dana, KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek). Setelah ada konfirmasi dari KSEI, pemegang rekening efek (perusahaan efek atau bank kustodian) wajib menyampaikan konfirmasi transaksi kepada nasabah masing-masing.¹⁰ Konfirmasi yang telah di *print out* oleh perusahaan efek kemudian diberikan kepada nasabah pemilik sub rekening efek yang tercatat dalam rekening efek milik perusahaan efek yang bersangkutan. Setiap konfirmasi transaksi yang diberikan kepada nasabah telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dalam perusahaan efek tersebut.¹¹

Selain itu terkait pembuktian kepemilikan saham melalui pemberian konfirmasi KSEI menyediakan pula jasa *Post Trade Processing* (PTP) yang merupakan suatu rangkaian aktivitas pelaku pasar modal yang dimulai dari transaksi yang terjadi di pasar modal hingga penyelesaian transaksi. PTP merupakan suatu akses kepada Manajer Investasi sebagai Pengguna C-BEST. Melalui PTP ini, baik Manajer Investasi maupun Anggota Bursa yang melaksanakan transaksi dapat melakukan konfirmasi transaksi (*trade confirmation*), instruksi penyelesaian (*settlement instruction*) dengan otomatis melalui C-BEST secara *online*.¹²

¹⁰ Tri Lukita Adi, **Skripsi: Peralihan Hak Kepemilikan Saham dan Pembuktian Hak Milik Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading) (Studi di Bursa Efek Surabaya)**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2006, hlm 92-93

¹¹ Ibid, hlm 94

¹² Kustodian Sentral Efek Indonesia, **Tata Cara Pendaftaran Pengguna C-Best untuk Post Trade Processing** (*online*), http://www.ksei.co.id/services/post_trade_processing, (22 Januari 2014)

B. Implikasi Hukum Kepemilikan Saham Menjadi Tanpa Warkat Dalam Hukum Pembuktian Secara Perdata Di Indonesia

1. Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Hakim didalam menjatuhkan putusannya atas suatu perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Kebenaran akan suatu peristiwa diukur dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan di pengadilan. Kepastian kebenaran peristiwa yang disengketakan akan didapat dengan penyajian alat bukti yang sah secara hukum. Hukum Acara Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti yang sah secara hukum ada lima dengan kekuatan pembuktian dari yang paling kuat, sebagaimana dalam Pasal 164 HIR jo. 1866 KUH Perdata, yakni:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah

Alat bukti tertulis menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang paling kuat dalam hukum pembuktian acara perdata. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepemilikan saham dalam perdagangan saham tanpa warkat bukti kepemilikan saham sudah tidak berbentuk sertifikat saham seperti pada saat masih diberlakukannya *script trading*, sebab transaksi jual beli saham telah dilakukan secara pemindahbukuan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Pasar Modal seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pengaturan mengenai saham dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memang tidak mengharuskan bentuk saham harus secara tertulis berbentuk lembaran sertifikat saham.

Berbeda dengan pada masa *script trading* yang mana investor memegang bukti kepemilikan saham berupa lembaran fisik sertifikat saham, pada perdagangan tanpa warkat lembaran fisik saham diubah menjadi data elektronik dengan sistem pemindahbukuan yang tercermin melalui rekening efek investor pada perusahaan efek maupun pada sub rekening efek yang tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Konfirmasi tertulis merupakan bukti kepemilikan

yang dapat dijadikan pegangan oleh investor sebagai suatu bentuk kepemilikan saham yang berbentuk fisik surat. Menurut Munir Fuady, konfirmasi tertulis mengenai transaksi nasabah pada perusahaan efek ini dapat dipersamakan dengan akta autentik sebagaimana dalam Pasal 165 HIR. Sebab menurut Munir bukti konfirmasi tertulis tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang di pasar modal sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat menjadi alat bukti secara sah atas keabsahan kepemilikan efek tanpa warkat.¹³

Pihak yang berwenang mengeluarkan konfirmasi tertulis dalam hal ini adalah perusahaan efek sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 Tentang Transaksi Efek angka 3 huruf p yang telah dijelaskan di atas. Perusahaan efek dalam hal ini dianggap sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan konfirmasi tertulis dalam bidang pasar modal sebab telah ditentukan oleh peraturan yang mengaturnya. Selain memenuhi unsur dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk disebut sebagai akta autentik konfirmasi tertulis juga harus dibuat dalam bentuk akta dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Akta merupakan suatu bentuk tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti terkait adanya hubungan hukum dan ditandatangani.¹⁴

Konfirmasi tertulis diberikan perusahaan efek kepada nasabahnya dibuat sebagai bukti bahwa telah dilakukannya order jual ataupun beli dari nasabah oleh perusahaan efek, dengan format konfirmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 Tentang Transaksi Efek angka 3 huruf p. Konfirmasi transaksi sebelum di berikan kepada nasabah perusahaan efek telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani dalam perusahaan efek yang bersangkutan. Walaupun konfirmasi yang diberikan kepada nasabah perusahaan efek merupakan hasil *print-out* dari konfirmasi yang diberikan KSEI kepada pemegang rekening efek dalam hal ini perusahaan efek melalui sistem jaringan yang saling terhubung melalui terminal komputer, akan tetapi konfirmasi transaksi ini tetap dapat disebut termasuk akta sebagaimana konfirmasi ini berisi tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti terkait adanya hubungan hukum jual beli saham dan ditandatangani.

¹³ Munir Fuady, op.cit., hlm 32

¹⁴ Ibid.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan Munir Fuady bahwa konfirmasi tertulis mengenai transaksi nasabah pada perusahaan efek ini dapat dipersamakan dengan akta autentik. Dalam hal ini konfirmasi transaksi yang dibuat secara tertulis memenuhi unsur akta autentik yang merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Konfirmasi transaksi yang ditandatangani dan dibuat dengan sengaja sebagai bukti kepemilikan saham telah memenuhi unsur dari akta. Sedangkan konfirmasi yang bentuknya dibuat sebagaimana dalam Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 Tentang Transaksi Efek angka 3 huruf p, dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di bidang pasar modal dalam hal ini KSEI dan perusahaan efek, maka dapat dipersamakan dengan akta autentik.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jaringan perdagangan tanpa warkat antara perusahaan efek dan bursa ini dapat dikategorikan sebagai jaringan sistem elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7, sebab terdapat dua sistem elektronik atau lebih yang terhubung yakni antara sistem elektronik perusahaan efek dengan sistem elektronik bursa. Sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 5 merupakan “serangkaian perangkat dari prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”. Pasca berlakunya UU ITE informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Apabila melihat dari definisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dinyatakan dalam UU ITE, sertifikat saham yang dikonversi menjadi data elektronik yang tercermin dalam saldo-saldo dana maupun efek dalam rekening investor merupakan informasi elektronik yang disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dalam sistem elektronik perdagangan dalam perusahaan efek, bursa

maupun KSEI. Saham sendiri baik dalam KUHD maupun dalam UUPT tidak disyaratkan harus dalam bentuk tertulis akan tetapi memang saham biasa dituangkan dalam bentuk warkat, maka dengan diberlakukannya perdagangan saham yang dilakukan secara pemindahbukuan terlebih pasca berlakunya UU ITE data elektronik yang tersimpan dalam sistem perdagangan dapat dijadikan bukti kepemilikan saham bagi investor, yang mana biasanya data elektronik saldo saham dituangkan dalam bentuk *account statement* atau konfirmasi tertulis.

3. Saham Sebelum Scripless Trading Dan Sesudah Scripless Trading

Dahulu bentuk saham yang berbentuk sertifikat fisik merupakan saham atas unjuk (*bearer stock*). Sedangkan sekarang dengan tidak adanya sertifikat saham maka konsekuensi kepemilikan saham menjadi saham atas nama (*registered stock*), dengan pencatatan nama nasabah melalui sub rekening efek dalam daftar kepemilikan KSEI yang terafiliasi dengan rekening efek perusahaan pada KSEI. Investor dalam rangka penitipan kolektif membuat perjanjian dengan perusahaan efek, kemudian investor memiliki rekening pada perusahaan efek, selanjutnya perusahaan efek memiliki rekening pada KSEI dalam rangka kepentingan nasabah dan perusahaan. Akan tetapi demi kepentingan nasabah disediakan jasa sub rekening efek yang tercatat atas nama nasabah pada KSEI.

4. Saham Sebelum UU ITE dan Sesudah UU ITE

Saham sebelum UU ITE diberlakukan dan sebelum *scripless trading* diberlakukan bentuk kepemilikannya berupa lembaran sertifikat fisik saham. Akan tetapi setelah berlakunya *scripless trading* namun sebelum berlakunya UU ITE bentuk kepemilikan saham sama halnya seperti bentuk kepemilikan saham sekarang ini yakni dinyatakan melalui data elektronik yang jual beli atasnya diwujudkan dalam bentuk konfirmasi tertulis. Sebelum UU ITE sendiri sebenarnya sudah dimungkinkan dokumen elektronik selayaknya dalam perdagangan tanpa warkat dijadikan alat bukti. Sebab sebelum UU ITE berlaku telah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 15 ayat (1) bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan/atau hasil cetaknya merupakan

alat bukti yang sah”. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih membutuhkan penguatan berupa legalisasi hasil cetak data elektronik yang terbentuk.¹⁵

Pasca berlakunya UU ITE transaksi elektronik yang menghasilkan dokumen elektronik seperti dalam perdagangan saham tanpa warkat semakin diakomodir sebab informasi elektronik maupun dokumen elektronik beserta hasil cetaknya yang dihasilkan dari sistem elektronik yang ada dalam UU ITE merupakan alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana bunyi Pasal 5 UU ITE.

5. Saham Scripless Yang Diakui Sebagai Alat Bukti Di Dalam Putusan

Ada dua putusan yang penulis ambil terkait alat bukti saham yang dipakai di pengadilan:

a. Putusan No. 145 K/Pdt/2012¹⁶

Putusan No. 145 K/Pdt/2012 terkait kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas sebagai Tergugat dengan Pemerintah RI, Bapepam-LK sebagai Tergugat II, III, serta KPEI, KSEI sebagai Turut Tergugat I, II, dan 30 nasabahnya sebagai para Penggugat. Kasus ini terkait adanya temuan Bapepam-LK atas dugaan penyalahgunaan rekening efek nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas.

Kepemilikan dana para Penggugat dalam rekening di perusahaan efek Tergugat 1 dibuktikan dengan *Account Statement* dengan periode sesuai posisi dana terakhir yang dimiliki. Hal tersebut oleh Majelis Hakim dianggap tepat dan berdasarkan hukum. Terkait hal ini gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Pembuktian disini berarti membuktikan dalam arti luas yakni dengan memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.¹⁷ Hal ini berarti bukti yang diajukan para Penggugat menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara yang pada akhirnya memenangkan para Penggugat. Kepemilikan dana nasabah sebesar yang termuat dalam *account statement* yang

¹⁵ Tri Lukita Adi, op.cit, hlm 101

¹⁶ Mahkamah Agung, Putusan No. 145 K/Pdt/2012 (*online*), <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, (6 Januari 2014)

¹⁷ R Subekti, **Hukum Pembuktian Cetakan ke-17**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm

kemudian dijadikan alat bukti para Penggugat membuktikan kepemilikannya dibenarkan secara hukum oleh Majelis Hakim yang memutus perkara.

Konsekuensi ini berarti berlaku pula untuk efek yang tertera pada *account statement* nasabah, sebab melalui *account statement* dapat memastikan bahwa antara jumlah dana yang bertambah atau berkurang dan efek yang bertambah atau berkurang di dalam rekening efek sesuai dengan transaksi yang dilakukan. *Account statement* (seperti rekening koran) atas posisi saldo yang ada dalam rekening efek investor akan diinformasikan dan dikirimkan oleh perusahaan efek setiap periode tertentu.¹⁸ Apabila jumlah dana dalam *account statement* diakui jumlahnya dan dijadikan alat bukti yang sah maka kepemilikan efek yang termuat dalam *account statement* seharusnya sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut.

Account statement keberlakuannya sebagai alat bukti termasuk dalam kategori Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE dalam hal ini sistem perdagangan tanpa warkat, sehingga hasil cetak tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia terutama Hukum Acara Perdata.

b. Putusan No. 774 PK/Pdt/2009¹⁹

Putusan No. 774 PK/Pdt/2009 terkait perselisihan antara Melia Handoko dengan PT Clemont Securities Indonesia dalam peninjauan kembali. Melia Handoko sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Terbanding melawan PT Clemont Securities Indonesia sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding.

Penggugat membuktikan tidak dilakukannya kewajiban pembayaran dari hasil jual beli efek oleh Tergugat Melia Handoko didasarkan atas konfirmasi

¹⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, op.cit, hlm 108

¹⁹ Mahkamah Agung, Putusan No. 774 PK/Pdt/2009 (*online*), <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, (6 Januari 2014)

transaksi atas nama Tergugat. Disini menunjukkan bahwa konfirmasi yang diberikan oleh PT Clemont Securities Indonesia kepada Tergugat bahwa kepemilikan saham atas Tergugat kewajibannya belum terlaksana sehingga kepemilikan saham tidak dapat dikatakan atas milik dari Tergugat. Konfirmasi tersebut oleh Hakim dibenarkan secara hukum dengan dimenangkannya Penggugat atas gugatan terhadap Tergugat, dengan dasar alat bukti berupa konfirmasi transaksi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembuktian kepemilikan saham dalam mekanisme perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) sebagai pembuktian kepemilikan hak secara hukum dalam KUHD, KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menentukan terkait pembuktian kepemilikan saham dalam mekanisme perdagangan saham tanpa warkat, dalam ketiga perundang-undangan tersebut saham masih didefinisikan dalam bentuk warkat atau surat, akan tetapi juga tidak ada larangan mengenai bentuk kepemilikan saham sebagaimana bentuk saham yang dikonversi menjadi data elektronik dalam perdagangan saham tanpa warkat. Perdagangan saham tanpa warkat sendiri pengaturannya diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal khususnya Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (5) yakni melalui pemindahbukuan yang dituangkan melalui konfirmasi transaksi sebagai bukti pencatatan dalam rekening efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam hal ini merupakan Lex Specialis derogate Lex Generali dari ketiga perundang-undangan tersebut yang mengatur mengenai saham yang diperdagangkan dalam pasar modal.
2. Implikasi hukum kepemilikan saham menjadi tanpa warkat dalam hukum pembuktian secara perdata di Indonesia bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data elektronik beserta hasil cetaknya yang dihasilkan dari transaksi perdagangan saham tanpa warkat melalui sistem elektronik

jaringan perdagangan yang tersedia diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum, dan merupakan perluasan alat bukti pada Hukum Acara di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam penggunaan alat bukti dalam proses peradilan di pengadilan pun bentuk lain kepemilikan saham selain sertifikat saham juga diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi. 2009. **Segi-Segi Hukum Pasar Modal**. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Gunawan Widjaja. 2006. **Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif**. Jakarta. Raja Grafindo.

Munir Fuady. 2003. **Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Cetakan Kedua**. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2008. **Hukum Pembuktian Cetakan ke-17**. Jakarta. Pradnya Paramita.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin. 2012. **Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3**. Jakarta. Salemba Empat.

Skripsi:

Tri Lukita Adi. **Skripsi: Peralihan Hak Kepemilikan Saham dan Pembuktian Hak Milik Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading) (Studi di Bursa Efek Surabaya)**. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2006.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Herziene Indische Reglement (HIR)

Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 Tentang Transaksi Efek

Internet:

Kustodian Sentral Efek Indonesia. **Tata Cara Pendaftaran Pengguna C-Best untuk Post Trade Processing** (*online*). http://www.ksei.co.id/services/post_trade_processing. (22 Januari 2014)

Mahkamah Agung, **Putusan No. 774 PK/Pdt/2009** (*online*), <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, (6 Januari 2014)

Mahkamah Agung, **Putusan No. 145 K/Pdt/2012** (*online*), <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, (6 Januari 2014)

Sotan Budhi Saria Sjamsoeddin. Tesis **Analisis Kekuatan Pembuktian Kepemilikan Efek Pada Transaksi Perdagangan Efek Tanpa Warkat** (*online*). Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2007. Administrator. Universitas Pancasila Program Magister Ilmu Hukum (*online*) <http://s2.hukum.univpancasila.ac.id>. (06 Oktober 2013). 2009.